

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) merupakan pencetus awal teori keagenan yang menjelaskan hubungan yang terbentuk antara principal (pemilik atau pemangku kepentingan utama) dengan agen (pihak yang mengelola atau melaksanakan tugas). Dalam konteks ini, posisi principal ditempati oleh masyarakat, sementara peran agen dijalankan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh kepala desa beserta aparat desa lainnya (Making, 2021). Teori keagenan berlandaskan pada tiga anggapan pokok terkait perilaku manusia, yaitu: a) individu biasanya memprioritaskan kepentingan diri sendiri, b) manusia memiliki batasan dalam kemampuan rasionalnya untuk memahami kemungkinan di masa depan, dan c) manusia pada umumnya cenderung menghindari resiko (Samsul et al., 2025).

Teori keagenan menjelaskan kondisi dimana satu atau lebih orang yang disebut sebagai *principal* (masyarakat) untuk menunjuk individu lain yaitu agen (Kepala Desa dan Aparat desa lainnya) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Hal ini, *Prinsipal* memberikan kuasa kepada agen untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan jasa tersebut.

Teori ini menyoroti pentingnya keselarasan antara tujuan principal dan agen untuk menghindari konflik seperti ketika agen lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding tujuan utamanya. Maka dari itu, situasi agensi ini melibatkan penyerahan tanggung jawab dan kekuasaan yang seringkali memerlukan sistem pengawasan untuk memastikan hasil yang ingin dicapai.

Teori ini memberikan cara berpikir tentang bagaimana memahami hubungan timbal balik dalam pengelolaan dana desa dengan melihat bagaimana masyarakat bekerja sama. Teori keagenan menjelaskan mengapa penting untuk bertanggung jawab dan terbuka guna menghindari perselisihan, dan mengapa pengendalian internal diperlukan untuk memastikan semua ini berjalan sebaik mungkin (Nurfitri & Ratnawati, 2023). Selain itu, teori keagenan juga mengingatkan kita bahwa di Indonesia, di mana desa-desa seringkali kekurangan Sumber Daya manusia atau teknologi, penerapan tanggung jawab, keterbukaan, dan pengendalian internal.

Korelasi teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen, bertugas menyampaikan laporan tentang penggunaan dana desa, yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. Kepala desa bersama perangkatnya, yang memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat daerah, dituntut mampu memimpin sekaligus mengoordinasikan proses pengelolaan dana desa serta menyajikan laporan secara terbuka. Hal ini menghendaki agar setiap individu yang mengemban amanah publik

senantiasa bertanggung jawab kepada masyarakat atas kinerjanya, sekaligus bersedia membuka informasi terkait pengelolaan dana desa secara transparan.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu bentuk tanggung jawab kepala desa untuk menjelaskan tentang pengelolaan dana desa yang diamanahkan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat dan BPD (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Akuntabilitas pada dasarnya menuntut pihak-pihak yang mengelola dana desa untuk berani mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil secara terbuka kepada public. Dengan sikap semacam ini, seluruh pemanfaatan dana desa bisa dijelaskan secara rinci dan gamblang, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai ke mana saja dana tersebut mengalir—hal ini merupakan wujud konkret dari transparansi yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (P. Suryani & Gaol, 2025).

Adapun dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 telah mengatur secara jelas bahwa pengelolaan keuangan desa wajib berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta harus dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran yang ketat. Hal ini menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola menurut prinsip-prinsip tersebut yang dimana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) berfungsi sebagai acuan utama dalam pengelolaan keuangan desa selama satu periode anggaran.

Akuntabilitas publik terdiri dari unsur kejujuran, kepatuhan terhadap regulasi dan kesiapan untuk menjalani proses audit. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat distribusi dana desa sangat rentan terhadap penyimpangan yang merugikan masyarakat, oleh karena itu memperkuat system akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan dana desa tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi desa (Laili & Suhaedi, 2023).

2.1.2 Transparansi

Transparansi yaitu prinsip untuk mendorong keterbukaan sehingga informasi dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh semua pihak dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat terhadap performa lembaga publik maupun organisasi (Karundeng et al., 2025). Transparansi sangat penting bagi pelayanan masyarakat karena ketika pelayanan publik transparan maka akan meningkatkan mutu dan efektivitas dari pelayanan publik tersebut. Ketika informasi dan prosesnya transparan maka masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan, memberikan umpan balik dan membangun rasa percaya kepada masyarakat yang nantinya akan mendorong perbaikan yang berkesinambungan dalam system pelayanan kepada publik (Irmawati et al., 2022). Informasi-informasi yang perlu disampaikan oleh pemerintah desa agar dapat diakses oleh masyarakat yaitu : a.) struktur APBDDes; b.) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan TPK; c.) Laporan Realisasi APBDDes; d.) kegiatan yang belum terlaksana; e.) sisa anggaran (Rofiah et al., 2023).

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa sebenarnya merupakan suatu rangkaian proses yang panjang, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai akhirnya pengawasan terhadap keuangan desa itu sendiri. Pemerintah desa dapat mengatur penggunaan dana desa secara efisien dan tepat, sehingga dukungan dari pemerintah untuk daerah sebagai penggerak utama dalam perkembangan perdesaan dapat berjalan tanpa hambatan. Pemerintah desa perlu menjalankan tanggungjawabnya dengan integritas dan keterbukaan. Selain itu tanggungjawab harus dilakukan dengan transparansi, kejelasan dan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat setempat untuk memastikan kemajuan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif (Saputra & Kusuma, 2024).

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan untuk mengatur sumber daya manusia termasuk kepala desa dan seluruh perangkat desa sehingga mereka dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal merupakan kumpulan prosedur yang disusun guna memberikan pengawasan dan panduan bagi berbagai pihak dalam organisasi, sehingga kegiatan operasional dapat berlangsung secara efisien dan efektif demi tercapainya tujuan secara maksimal, seklaigus memastikan seluruh aktivitas saling terintegrasi dengan baik, menekan kemungkinan terjadinya

kesalahan dan mendukung tercapainya hasil yang diinginkan (Suandewi, 2021).

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah pada dasarnya dibangun untuk menjamin adanya keyakinan yang cukup memadai, baik dari segi efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, keandalan laporan keuangan yang disajikan, keamanan aset yang dimiliki, maupun tingkat kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat terbentuk sistem pengendalian yang bersifat menyeluruh, baik di lingkup pemerintah pusat sekalipun pemerintah daerah. Terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal, yakni: a) lingkungan pengendalian; b) penilaian resiko; c) kegiatan pengendalian; d) informasi komunikasi; e) pemanfaatan pengendalian internal (Polutu et al., 2022). Guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel diperlukan sistem pengendalian serta pengawasan yang tegas dan jelas. Pengendalian dan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan banyak kalangan dari masyarakat desa, badan Permusyawaratan desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan dari penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat penelitian serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(Saputra & Kusuma, 2024)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa bergas kidul kabupaten semarang	Variabel Transparansi, Akuntabilitas dan pengelolaan dana desa	Variabel Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi, Objek Penelitian Yaitu Kabupaten Tegal	1. Transparansi Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 2. Akuntabilitas tidak Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 3. Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa
(Meliani & Sari, 2024)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Prinsip Good	Variabel Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Variabel Sistem Pengendalian Internal	1. Transparansi Memiliki Dampak Yang Positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Prinsip Good Governance Di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Akuntabilitas Juga Berperan Positif

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Governance			Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip Good Governance Di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
(Rahmawati et al., 2024)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Variabel Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengelolaan Dana Desa	Variabel Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi	1. Akuntabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Tanah Datar. 2. Transparansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Tanah Datar 3. Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
(Murapi & Astarini, 2025)	Pengaruh Akuntabilitas Dan	Variabel Akuntabilitas, Transparansi	Variabel Sistem Pengendalian	1. Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Deskriptif Asosiatif	Dan Pengelolaan Dana Desa	Internal	Anggaran 2. Transparansi Juga Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Anggaran
(Zaki et al., 2020)	Efektivitas pengelolaan dana desa kecamatan Tuntang: Perspektif teori keagenan	Variabel pengelolaan dana desa	Variabel Transparansi, akuntabilitas dan variabel system pengendalian internal sebagai variabel moderasi	1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan tuntang. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan tuntang. 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan tuntang.

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(Rumsowek & Bhilawa, 2025)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa se-kecamatan jayapura selatan)	Variabel Akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa	Variabel Sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi	1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. 2. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
(Yuliasuti et al., 2022)	Pengaruh Transparansi, akntabilitas, system pengendalian internal,dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa	Variabel System Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Dana Desa,transparansi dan akuntabilitas	Variabel system pengendalian internal sebagai variabel moderasi dan objek penelitiannya yaitu kabupaten tegal.	1. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 4. Partisipasi berpengaruh

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				positif terhadap Pengelolaan Dana Desa 5. Transparansi, akuntabilitas, system pengendalian dan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
(Adrianti et al., 2023)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa	Variabel Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa Dan System Pengendalian Internal	Objek Penelitian Yaitu Desa Kabupaten Tegal	1. Akuntabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Dana Tunai Desa. 2. Transparansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Dana Tunai Desa 3. Sistem Pengendalian Internal Tidak Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Uang Tunai

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				Dana Desa 4. Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
(Leiwakab essy et al., 2022)	Pengaruh Self-Efficacy Dan Self-Esteem Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Moderasi Variabel	Variabel Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa Dan System Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Transparansi Dan Ibjek Penelitian	1. Self-Efficacy Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Self-Esteem Vberpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 3. Sistem Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Sebagai Variabel Moderasi Dalam Hubungan Pengaruh Self-Efficacy Dan Self-Esteem Terhadap Akuntabilitas

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				Pengelolaan Dana Desa
(Budiati et al., 2020)	Pengaruh Gcg terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal	Variabel Pengelolaan Dana Desa Dan System Pengendalian Internal	Variabel Akuntabilitas Dan Transparansi Serta Objek Penelitiannya	1. Transparansi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. 2. Akuntabilitas Berpengaruh Positif Signi-Fikan Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. 3. Partisipasif Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, 4. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Berpengaruh Positif

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				Signi-Fikan Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. 5. Sistem Pengendalian Internal Gagal Memoderasi Hubungan Transparansi De-Ngan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak 6. Sistem Pengendalian Internal Gagal Me-Moderasi Hubungan Akuntabilitas Dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak 7. Sistem Pengendalian Internal Gagal Me-Moderasi Hubungan Partisipasi Dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Ke-

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				Camatan Karangawen Kabupaten Demak.
(Novrianti et al., 2022)	Peran system pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap kinerja anggaran pada unit kerja universitas negeri semarang	Variabel Akuntabilitas Dan Transparansi dan system pengendalian internal	Variabel Pengelolaan Dana Desa Serta Objek Penelitiannya	1. Akuntabilitas Berpengaruh positif Terhadap kinerja anggaran unit kerja universitas negeri semarang 2. Transparansi Berpengaruh Terhadap kinerja anggaran unit kerja universitas negeri semarang 3. Partisipasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran unit kerja universitas negeri semarang 4. System pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitass terhadap kinerja anggaran unit kerja universitas negeri

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				semarang 5. System pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi kinerja anggaran unit kerja universitas negeri semarang 6. System pengendalian internal memoderasi pengaruh partisipasi kinerja anggaran unit kerja universitas negeri semarang.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas yaitu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa memikul tugas untuk menegakkan berbagai aturan sekaligus mengelola aset yang dimiliki desa, dengan harapan agar masyarakat di wilayah tersebut benar-benar dapat merasakan manfaat dari pemanfaatan dana desa yang ada. Desa mengemban tanggungjawab dalam menegakkan peraturan serta mengelola asset desa, dengan maksud agar

wilayah setempat dapat memperoleh manfaat nyata dari pemanfaatan dana desa (Saputra & Kusuma, 2024). Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat, serta kepada instansi pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang terkait masalah tersebut (Meliani & Sari, 2024). Hal ini memastikan transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya desa, yang memungkinkan semua pihak untuk berkumpul dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan Akuntabilitas, Teori Keagenan menekankan bahwa Pemerintah desa berperan sebagai agent yang diberi kewenangan oleh principal (masyarakat). Dana Desa yang harusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi jika tidak diawasi akan disalahgunakan oleh pengelolanya, jadi akuntabilitas berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan agar Agent (pemerintah desa) dapat melaporkan penggunaan dana desa secara transparan (Murapi & Astarini, 2025). Terwujudnya akuntabilitas yang kokoh, masyarakat memiliki ruang untuk berdiskusi, melakukan evaluasi serta menyampaikan masukan sehingga pengelolaan dana desa dapat berlangsung lebih efisien dan berkeadilan.

Hasil Penelitian yang dilakukan (Meliani & Sari, 2024) terungkap bahwa Akuntabilitas memberikan dampak yang positif sekaligus signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Kesimpulan yang tidak jauh berbeda juga muncul dari penelitian (Murapi & Astarini, 2025) yang mendapati bahwa Akuntabilitas turut berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

pengelolaan dana desa. Di sisi lain, studi yang dikerjakan oleh (Adrianti et al., 2023) memperlihatkan bahwa Akuntabilitas juga membawa pengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai. Senada dengan itu, penelitian (Rahmawati et al., 2024) pun menegaskan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Mengacu pada beberapa temuan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

2.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan elemen yang tak bisa diabaikan dalam pengelolaan dana desa, sebab seluruh informasi yang menyangkut penggunaan dana tersebut harus disampaikan secara jujur dan terbuka, baik kepada masyarakat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Semakin jujur dan terbuka pengelolaan dana desa maka semakin baik juga kualitas manajemennya (Zaki et al., 2020). Transparansi bertindak sebagai mekanisme penting untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam berbagai tahap pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa (Meliani & Sari, 2024). Adanya keterbukaan informasi semua pihak yang terlibat dapat memahami setiap proses yang berjalan sehingga mengurangi resiko terjadinya tindak kecurangan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Pandangan ini diperkuat oleh

teori keagenan dimana transparansi memberikan dampak langsung terhadap pengelolaan dana desa melalui terbentuknya akuntabilitas, meningkatnya pengawasan dari masyarakat, serta terjaminnya efisiensi dalam penggunaan dana. Transparansi dipandang sebagai sarana untuk mengatasi konflik kepentingan. Prinsipal memanfaatkan transparansi guna menjaga hubungan dengan agen, menekan biaya kelembagaan dan memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan tujuan desentralisasi.

Studi yang dilakukan (Rumsowek & Bhilawa, 2025) mengungkapkan bahwa Transparansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun, hasil yang agak berlainan justru diperoleh dari penelitian (Amleni et al., 2022) yang menunjukkan bahwa meski Transparansi berpengaruh positif, pengaruh tersebut ternyata tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Di samping itu, penelitian (Yuliasuti et al., 2022) turut memperkuat bahwa Transparansi memiliki pengaruh positif sekaligus signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berpijak dari uraian tersebut, maka disusunlah hipotesis berikut:

H₂ : Transparansi Berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

2.3.3 Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut *Committee of the American Institute of Accountants* (AICPA) dalam (Sari et al., 2019) pengendalian internal dapat dipahami sebagai suatu bentuk struktur organisasi yang di dalamnya tergabung berbagai metode dan kebijakan secara terpadu, yang diterapkan untuk melindungi aset

organisasi, menjaga ketepatan dan keandalan data akuntansi, mendorong terciptanya efisiensi dalam kegiatan operasional, serta memastikan seluruh kebijakan manajemen benar-benar dipatuhi. Gagasan pengendalian internal ini meliputi kebijakan dan prosedur yang disusun untuk memberi jaminan bahwa sasaran khusus organisasi dapat terwujud. Sementara itu, mengutip pandangan Mardiasmo dalam (Sari et al., 2019) terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya akuntabilitas. Pertama, adanya keterbukaan dari penyelenggaraan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik dengan menerima masukan serta melibatkan berbagai lembaga. Kedua, adanya tolok ukur kinerja di setiap institusi yang dapat dinilai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ketiga, adanya partisipasi bersama untuk menciptakan suasana mendukung pelayanan masyarakat melalui prosedur yang sederhana, biaya yang terjangkau dan pelayanan yang cepat.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Novrianti et al., 2022) Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, dengan catatan sistem tersebut dijalankan dengan baik. Pandangan ini sejalan dengan Teori Keagenan, yang pada intinya menggambarkan relasi antara principal, dalam hal ini pemerintah desa, dengan agen yang berperan sebagai pengelola desa dan pelaksana di lapangan. Teori ini tekanan pengurangan risiko/moral hazard (ketidakjujuran agen) dan informasi asimetris melalui mekanisme kontrol SPI yang membantu akuntabilitas berfungsi lebih efektif dalam

pengelolaan dana desa. Mengacu pada uraian di atas, maka dirumuskanlah hipotesis berikut:

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

2.3.4 Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana diungkapkan oleh (Fauziyah, 2019) keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat dapat mendongkrak kualitas laporan keuangan OPD. Proses ini dijalankan secara berkesinambungan oleh pimpinan bersama seluruh pegawai, dengan tujuan agar sasaran organisasi tercapai lewat kegiatan yang efisien, laporan keuangan yang bisa dipercaya, terjaganya aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi seluas mungkin mengenai dana desa. Temuan semacam ini juga sejalan dengan hasil penelitian (M. K. Suryani & Hidayat, 2023) yang mendapati bahwa Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

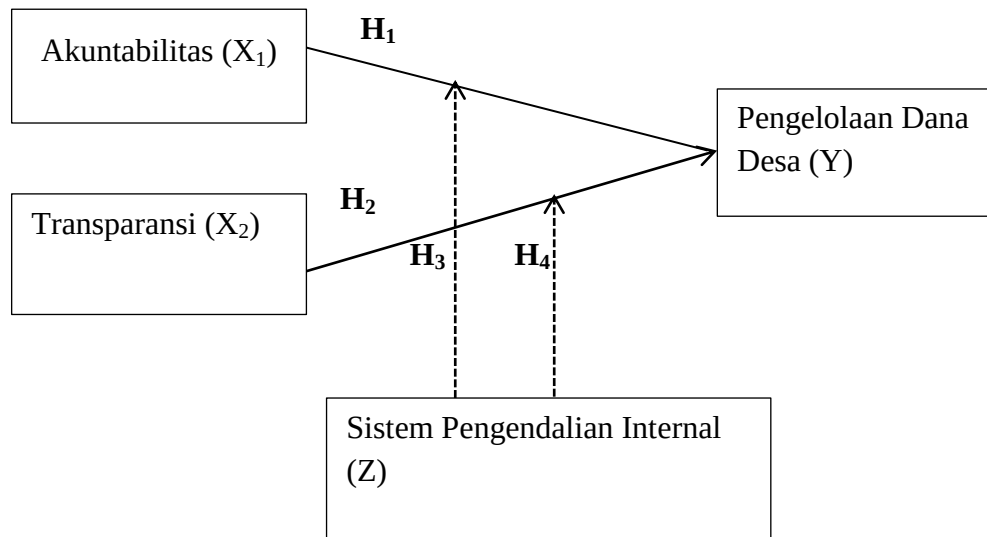
Pandangan ini diperkuat oleh Teori Keagenan, yang pada dasarnya menjelaskan hubungan antara principal yakni pemerintah desa dengan agen yang bertindak sebagai pengelola desa sekaligus pelaksana kegiatan. Dalam konteks ini, Sistem Pengendalian Internal berperan sebagai faktor moderasi

yang bisa memperkuat sekaligus mengiringi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Adapun transparansi yang dimaksud di sini mengacu pada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. SPI berfungsi sebagai moderator dengan meningkatkan efektivitas transparansi; sebab meskipun tingkat transparansi tinggi, apabila SPI lemah, pengelolaan dana tetap rawan terhadap risiko seperti korupsi. Gagasan tersebut erat kaitannya dengan Teori Keagenan (Agency Theory), yang pada intinya menjabarkan relasi antara principal baik itu pemerintah maupun masyarakat desa yang berkedudukan sebagai pemilik dana dengan agen yang bertindak sebagai pengelola desa sekaligus pihak yang menjalankan pelaksanaan di lapangan. Teori ini menyoroti penitngnya menekan kesenjangan informasi sekaligus mencegah munculnya risiko moral melalui mekanisme pengendalian seperti SPI sehingga transparansi dapat berjalan lebih maksimal dalam pengelolaan dana desa.berdasarkan dari penjabaran tersebut , maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2.4 Model Penelitian

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dirumuskanlah hipotesis berikut:



Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 2. 1 Model Penelitian